

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

NAMA : TYAS KURNIA SARI

NIM : 31401606719

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun Oleh:

Tyas Kurnia Sari

NIM: 31401606719

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, 13 Agustus 2022

Dr.Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211490002

**HALAMAN PERSETUJUAN
DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**Disusun Oleh:
Tyas Kurnia Sari
Nim: 31401606719**

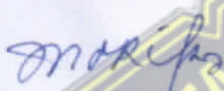
Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal,

Susunan Dewan Penguji

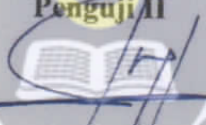
Pembimbing

Penguji I


Dr. Hj. Indri Kartika, M. Si., Ak., CA
NIDN: 0613086401


Dr. Sri Anik, S.E., M.Si
NIDN: 0604086802

Penguji II


Sutapa, SE, MSi, Akt
NIDN : 0601057001

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal,


Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN : 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Tyas Kurnia Sari

NIM : 31401606719

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Tyas Kurnia Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri”

(QS Al Isra : 7)

“Barang siapa melapangkan (memudahkan) seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya salah satu kesusahan dihari kiamat.”

(HR.Muslim dari Abu Hurairah)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ayah, Ibu, Suami, Anak, Kakak dan semua keluarga
Terimakasih atas doa dan dukungannya.
- Sahabat-sahabatku
Terimakasih untuk doa, semangat dan kebersamaan kalian.

KATA PENGANTAR

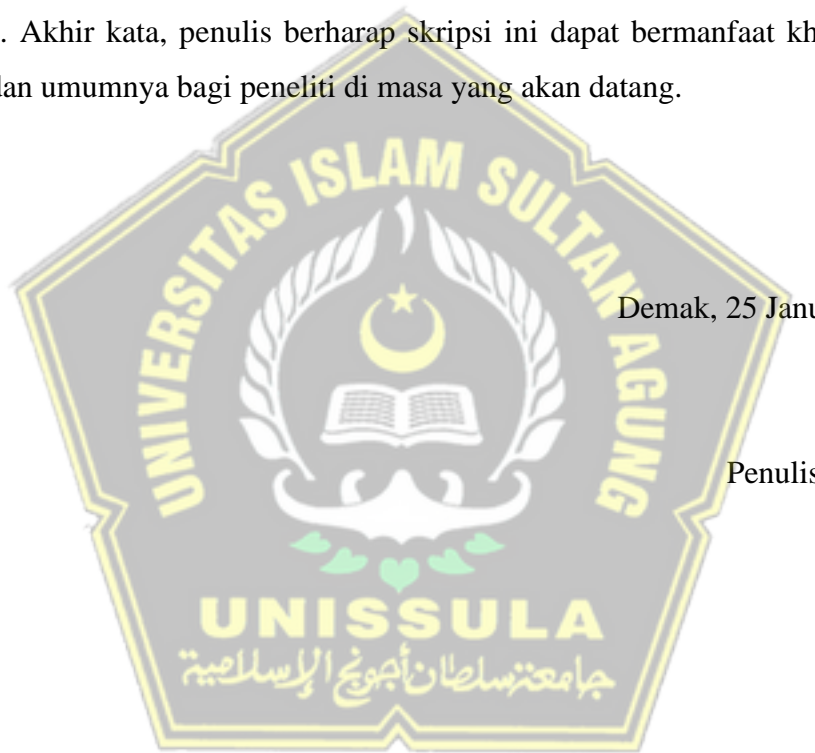
Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai syarat guna memperoleh gelas sarjana strata I pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph D selaku Dekan Fakultas Ekonomi;
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi;
3. Ibu Dr. Indri Kartika, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan Skripsi;
4. Bapak Sulaksono, Ibu Sumini, suami penulis Mohamad Irfan Setiono, dan anak penulis Ghafiel Setyo Billah serta seluruh keluarga yang tidak pernah surut memberikan dukungan moril maupun materiil, kasih sayang, perhatian, dan doa kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi;
5. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama penulis menjalankan masa kuliah di S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung;
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa S1 Akuntansi Kelas Seroja Tahun 2017 lainnya yang telah belajar, berbagi, berjuang bersama dalam suka maupun duka. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan selalu diridhoi Allah SWT;

7. Semua pihak yang telah membantu penulis di dalam penyusunan Skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah mendukung, diberikan pahala yang setimpal dan kita semua terjalin dalam ikatan silaturahmi. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi peneliti di masa yang akan datang.



Demak, 25 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	18

2.3 Hipotesis Penelitian	24
2.4 Kerangka Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Variabel Penelitian.....	31
3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.4 Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel	37
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.7 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Deskripsi Responden.....	45
4.2 Deskripsi Variabel.....	50
4.3 Hasil Analisis Data.....	59
4.4 Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Penelitian.....	35
Tabel 4.1. Penyebaran Kuisisioner.....	45
Tabel 4.2. Gender Responden.....	46
Tabel 4.3. Usia Responden.....	47
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.5 Lama Bekerja.....	49
Tabel 4.6. Indikator Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	51
Tabel 4.7. Indikator Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah.....	53
Tabel 4.8. Variabel <i>Good Corporate Governance</i>	54
Tabel 4.9. Variabel Sistem Informasi Akuntansi.....	55
Tabel 4.10. Variabel Teknologi Informasi.....	56
Tabel 4.11. Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	58
Tabel 4.12. Hasil uji validitas.....	60
Tabel 4.13. Hasil uji realibilitas.....	61
Tabel 4.14. Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.15. Uji Gletser.....	63
Tabel 4.16. Uji <i>Kolmogorof-Smirnov</i>	65
Tabel 4.17. Rangkuman Regresi Berganda.....	66
Tabel 4.18. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	69

Tabel 4.19. Koefisien Determinasi.....70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	30
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Daftar Kuesioner.....	91
Lampiran 2.1 Daftar Instansi Kabupaten Demak.....	98
Lampiran 3.1 Hasil Output SPS.....	99



ABSTRACT

The local government as the manager of public funds must be able to provide the necessary financial information in an accurate, relevant, timely and reliable manner so that they are required to have a reliable information system. Financial reports are a medium for an entity in this case the government to account for its financial performance to the public. This study aims to examine and analyze the quality of financial reports, government accounting standards, quality of government officials, good corporate governance, accounting information systems, and information technology on the quality of financial reports. The method used in this research is a survey using a questionnaire measuring instrument. The sample of this research is civil servants who have the positions of treasurer, head of the finance division, and accounting staff of all type A SKPD in Demak Regency. The sampling technique used is purposive sampling and the analysis used in this study is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the application of accounting standards has a positive effect on the quality of financial statements, the quality of government apparatus has a positive effect on the quality of financial reports, good corporate governance has a positive effect on the quality of financial reports, accounting information systems have a positive effect on the quality of financial statements, information technology has a positive effect on the quality of financial statements. quality of financial reports.

Keywords: Government Accounting Standards, Quality of Government Apparatus, Good Corporate Governance, Accounting Information Systems, Information Technology, Quality of Financial Reports.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Sampel penelitian ini adalah yaitu PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi seluruh SKPD tipe A di Kabupaten Demak yang berjumlah 78 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 78 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa: (1) Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak, (2) Semakin baik Kualitas Aparatur Pemerintah maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak, (3) Semakin baik *Good Corporate Governance* maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak, (4) Semakin baik Sistem Informasi Akuntansi maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak, (5) Semakin baik Teknologi Informasi maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kontribusi pengembangan ilmu dan memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, System dan Teknologi Informasi Kualitas Laporan Keuangan.

INTISARI

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal (Sanjaya 2017). Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Pura 2021). Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, berperan vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah (Abdallah 2020). Manfaat dari Laporan Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu entry point untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan (Yanti, Made, and Setiyowati 2020). Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya (Wungow, Lambey, and Pontoh 2016). Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi (Abdallah 2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi. Penelitian ini menekankan pada hubungan antara variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Hasil menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang baik didorong oleh beberapa factor yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi. Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi maka akan semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik dituntut untuk dapat menyediakan informasi keuangan diperlukan secara tepat waktu, akurat, relevan, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal (Sanjaya 2017). Arti dari Laporan keuangan adalah media bagi entitas yaitu pemerintah agar mempertanggungjawabkan keuangannya ke masyarakat atau publik (Pura 2021). Pemerintah wajib menyediakan laporan yaitu laporan keuangan harus memiliki informasi keuangan berkualitas. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki beberapa syarat yaitu dapat dipahami, andal, dapat dibandingkan dan relevan. (Armel, Nasir, and Safitri 2017).

Laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, berperan vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah (Abdallah 2020). Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang dapat berjalan dari awal hingga akhir penggunaan uang rakyat mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya (Safitri, Abdul Wahid Mahsuni, and Junaidi 2020). Maka dari itu perlu adanya peningkatan peranan Laporan Keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari Laporan

Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu entry point untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan (Yanti, Made, and Setiyowati 2020). Laporan keuangan dibuat sebagai pemberi informasi mengenai posisi utang, harta, dan modal dan terjadi didalam perusahaan serta laba dan ruginya (Wungow, Lambey, and Pontoh 2016). Penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan tertentu yaitu laporan keuangan secara umum menyajikan informasi terkait kinerja keuangan, posisi dan arus kas perusahaan serta bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi (Abdallah 2020).

Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Prasetyo, Andayani, and Sofyan 2020). Semakin pesat nya perkembangan sektor publik di Indonesia karena tuntutan globalisasi dan mewajibkan kebijakan pemerintah agar semakin mandiri dengan otonomi daerah serta perlu melakukan penataan sistem akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi yang baik sebagai pendukung terwujudnya kualitas laporan keuangan daerah yang akuntabel, dalam mengelola anggaran juga menggunakan system desentralisasi secara efisien, transparan dan dapat diperanggungjawabkan. Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Pura 2021).

Berdasarkan riset-riset sebelumnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparat pemerintah daerah, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi (Kesuma, Anwar, and Darmansyah 2017b) dan teknologi informasi (Rahmawati, Mustika, and Eka 2018).

SAP yaitu standar laporan keuangan yang disusun dan memenuhi kualifikasi informasi-informasi keuangan dan berguna bagi para penggunanya (Karsana and Suaryanaayan 2017). Informasi relevan merupakan salah satu indikator laporan keuangan dan sudah memenuhi kualifikasi informasi. Namun penelitian (Aryani and Muliati 2020) memberikan hasil bahwa penerapan standar akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. PNSD yang professionalakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD yang profesional akan dapat memenuhi standard dan target kinerja yang telah ditetapkan. PNSD yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP (Azzindani and M. Irwan 2020). Namun hasil penelitian lain menyatakan sebaliknya yaitu bahwa kompetensi Pejabat Pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Fauziyah 2019).

Good governance dapat diartikan sebagai proses pengelolaan suatu pemerintahan dengan *stakeholders* dalam beberapa bidang yaitu bidang sosial, bidang

ekonomi dan bidang politik, serta melibatkan sumber daya manusia atau keuangan berdasarkan tujuan masing-masing (Widia 2020). Suatu pemerintahan dikatakan menerapkan atau melaksanakan *good governance* dengan benar akan berdampak kepada kualitas laporan yang akan dipertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik pada akhir tahun (Prihatini 2020). *Good governance* salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Prihatini 2020). *Good governance* berpengaruh terhadap suatu kualitas informasi keuangan daerah, laporan keuangan dilaksanakan sesuai prinsip *good governance* yaitu transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas.

Hasil penelitian membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Khairaningrum Mulyanti and Rahma 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017) menunjukkan hasil *good governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur segala aktifitas dalam pencatatan keuangan daerah, mulai dari proses pembuatan, pencatatan, pelaporan, hingga pada pertanggungjawaban (Jauhari, Dewata, and Suhairi Hazisma 2021) sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur bagaimana suatu keuangan daerah menjadi lebih terstruktur, terarah,

berkualitas dan dapat dipahami dengan mudah serta mampu dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik sistem informasi akuntansi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Sanjaya 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dwi Indriyanti (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tercapainya Laporan keuangan yang memiliki kualitas bagus dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana membangun jaringan sistem informasi manajemen. Hasil penelitian menunjukkan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Rahmawati, Mustika, and Eka 2018). (Fauziyah 2019) memberikan hasil Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, Andayani, and Sofyan 2020) membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa juga berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparat pemerintah daerah, *good corporate governance* serta sistem informasi akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini terutama mengacu kepada penelitian (Khairaningrum Mulyanti and Rahma 2020) dan (Kesuma, Anwar, and Darmansyah 2017b) yang meneliti peran *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Perlu diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, yaitu 1) penambahan variabel teknologi informasi yang diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan 2) Lokasi penelitian sebelumnya terdapat di perencanaan dan pengelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, bendahara, serta Satuan Pengawasan Internal yang bekerja pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan di Demak karena berdasarkan pengamatan peneliti, Kabupaten Demak masih memiliki beberapa permasalahan dalam kualitas laporan keuangan di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ditunjukkan dengan seringnya keterlambatan pelaporan, masih banyaknya eror dalam penginputan laporan keuangan dan masih kurangnya kompetensi IT SDM bendahara di masing masing perangkat Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan GAP dari penelitian terdahulu maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh kualitas aparat pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Bagaimana pengaruh teknologi informasi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas aparat pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi mengenai analisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparat pemerintah daerah, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi dan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai masukan serta pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Demak untuk mengetahui arti pentingnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparat Daerah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *Stewardship theory*, yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para eksekutif tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson and Davis 1991).

Hubungan *Stewardship theory* terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu eksekutif sebagai *steward* dapat bertindak sesuai kepentingan masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara kepada masyarakat (Löhde, Campopiano, and Calabrò 2020). Guna mewujudkannya pihak eksekutif berusaha membuat laporan keuangan daerah berkualitas sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan daerah berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah, aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi serta teknologi informasi yang baik (Oktarina, Raharjo, and Andini 2016).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan

perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan umum pelaporan keuangandan akuntansi yaitu (Ikhsan 2018):

1. Dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban serta pengelolaan (*accountability and stewardship*).
2. Dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai indikator evaluasi kinerja manajerial dan organisasional(*managerial and control*).

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator: Kualitas laporan keuangan diukur dengan dimensi dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/pemerintah daerah (Sanjaya 2017). SAP disajikan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi pengantar standar akuntansi pemerintahan serta disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP harus

digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Armel, Nasir, and Safitri 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan prinsip-prinsip atau acuan bagi pemerintah dalam mengelola dan melaporkan laporan keuangan daerah. SAP dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan (Kusuma, Anwar dan Darmansyah, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2021) menunjukkan ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas
5. Prinsip konsistensi
6. Prinsip pengungkapan lengkap dan Prinsip penyajian wajar.

Sedangkan Sanjaya *et.al* (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah harus memiliki beberapa karakteristik yaitu professional, efektif dan efisien.

Asumsi dasar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yaitu anggapan dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

- (a) Asumsi kemandirian entitas
- (b) Asumsi kesinambungan entitas
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

2.1.1 Kualitas Aparat Pemerintah Daerah

Deesleer menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan (Kesuma, Anwar, and Darmansyah 2017b). Pemerintah daerah sangat membutuhkan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkualitas (Zulkarnain and Ningrum 2020). Dengan demikian kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan dari aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Pengukuran kualitas sumber daya manusia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 mengenai pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Menurut (Soedarmayanti, 2012:51) bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. “*Quality of work*”, kualitas kerja dicapai dengan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

2. *Promptness*, ketangkasan serta kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. *Initiative*, semangat melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggungjawabnya.
4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.
5. *Communication*, komunikasi yaitu bagian penting dalam membangun relasi serta menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis”

Sedangkan teori kinerja dari Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia terdapat indikator kinerja aparatur pemerintah yaitu:

1. Produktivitas. karakteristik kepribadian individu muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan serta upaya individu selalu berusaha agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.
2. Kualitas layanan. Banyak pandangan negatif terbentuk mengenai organisasi publik, muncul disebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Oleh karena itu kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter dalam menilai kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas. kemampuan organisasi mengenali serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukan ke dalam indikator kinerja karena dapat menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.

4. **Responsibilitas.** Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan dengan prinsip administrasi yang benar serta sesuai dengan kebijakan organisasi baik, eksplisit dan implisit.
5. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas publik menunjukkan berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan serta kegiatan organisasi publik tersebut konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjabarkan bahwa karakteristik aparatur negara yang berkualitas diukur dengan objektif; terukur; akuntabel; partisipatif; dan transparan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance bisa disebut juga suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Khairaningrum Mulyanti and Rahma 2020). *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah

shareholders, lenders, employees, executives, government, customers dan stakeholders yang lain (Rasinta 2017).

Penerapan *Good Corporate Governance*, mengacu pada lima prinsip dalam setiap penyelenggaraan dalam suatu organisasi atau perusahaan agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance Konsep *good governance* telah terselenggara apabila memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan *good governance*, (Fokky, Wasitaatmadja, and Hamdayama 2019) diantaranya :

1. *Transparansi* mengandung unsur keterbukaan yaitu transparansi pemerintah dalam melaksanakan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, sosial serta politik.
2. *Akuntabilitas* dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban. Bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan kepada yang telah mendelegasikan kewenangan dan mereka puas atas kinerja pelaksanaankegiatannya.
3. *Responsibilitas*, merupakan kepatuhan terhadap peraturan/perundang-undangan serta peduli terhadap masyarakatdan kelestarian lingkungan.
4. *Independensi*, dimana mengandung arti tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, tidak saling mendominasi dan tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain.
5. *Kesetaraan dan Kewajaran*, misalnya yaitu memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, dan memberikan perlakuan yang setara dan wajar bagi pemangku kepentingan.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menyatakan bahwa Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Uviyanti and Pramuka 2020). Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputersasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya (Uviyanti and Pramuka 2020). Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka kualitas laporan keuangan akan tetap terjaga, sebab pencatatan dilakukan oleh sistem yang dapat diakses oleh beberapa bagian dalam akuntansi, sehingga penyelewengan bisa ditekan dan kualitas laporan keuangan semakin meningkat (Gusherinsya and Samukri 2020). SIKD dapat diukur dengan sistem pelayanan, kualitas sistem dan kualitas informasi (Delone, Mclean, and William 2003).

De Lone dan McLean, menerangkan sistem informasi berkualitas yaitu sistem yang fleksibel, efisien, dapat diakses, tepat waktu atau (*Quality information system is usually flexible, efficient, accessible and timely*). Todd menerangkan karakteristik sistem informasi yang berkualitas yaitu kemudahan dalam menggunakan, kemudahan

belajar dan fleksibilitas sistem. Dimensi yang digunakan adalah: Sistem Mutu, Kualitas informasi, Kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (Wixom dan Todd 2005).

2.1.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting karena dapat mendukung proses dan operasi bisnisnya, pengambilan keputusan, dan strategi peningkatan *competitive advantage* (Silalahi 2020). Teknologi informasi akan bernilai pada saat digunakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi (Susena and Supadmi 2020). Teknologi informasi bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan sehingga organisasi dapat mengambil keuntungan dan kesempatan dengan menggunakan informasi tersebut (Silalahi 2020). Oleh karena itu, banyak perusahaan mengeluarkan dananya untuk membuat teknologi informasi yang memadai. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi pengetahuan dan ketrampilan seseorang (Fahriyah and Yoseph 2020).

Dengan demikian disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu produk dalam bidang teknologi yang dapat membantu memberikan informasi dengan cepat, termasuk di dalamnya dalam memberikan informasi tentang unsur-unsur yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Dimensi teknologi informasi Teknologi informasi diantaranya adalah meningkatkan kompleksitas manajemen, mempengaruhi ekonomi internasional

(globalisasi), waktu tanggap (waktu respons), dan mengurangi tekanan dari pihak luar akibat adanya persaingan bisnis (Lusane, 2020). Pendapat lain, teknologi informasi dapat diukur berdasarkan intensitas pemanfaatan teknologi informasi, frekuensi pemanfaatan teknologi informasi, jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam teknologi informasi, pemeliharaan dan integrasi informasi (Dwi 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good corporate governance, sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai topik yang serupa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	(Khairaningrum Mulyanti and Rahma 2020)	<u>Variabel Independen (X)</u> Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> <u>Variabel Dependen penelitian ini (Y)</u> Kualitas laporan keuangan	1. Sampel 120 karyawan <i>iron birds logistic</i> 2. Analisis Regresi Linear Sederhana. Berganda	1. terdapat pengaruh antara penerapan good corporate governance (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)
2.	(Mia, Raharjo, and Andini	<u>Variabel dependen:</u>	1. Sampel 277 pegawai	1. Penerapan standar akuntansi

	2016)	<p>Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan standar akuntansi pemerintahan - Kualitas aparatur pemerintah daerah - Good governance 	<p>Pemerintah Kota Semarang</p> <p>2. Alat analisis regresi berganda</p>	<p>berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p>
3.	(Ikhsan 2018)	<p><u>Variabel dependen</u>: Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan standar akuntansi pemerintahan - Sistem informasi akuntansi - Sistem pengendalian internal - Komitmen organisasi - Good governance 	<p>1. Sampel 30 SKPD kota Medan, dengan sampel sebanyak 70</p> <p>2. Alat analisis regresi berganda</p>	<p>1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>4. Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas</p>

				laporan keuangan 5. Good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4.	(Rahmawati, Mustika, and Eka 2018)	<p><u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah - Pemanfaatan Teknologi Informasi - Sistem Pengendalian Intern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel 37 SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2. Alat analisis regresi berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5.	(Oktarina, Raharjo, and Andini 2016)	<p><u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan standar akuntansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel 54 pegawai dari 8 SKPD Pemerintah Kabupaten Pati 2. Alat analisis regresi berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pengawasan berpengaruh

		<p>pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan - Kualitas aparatur pemerintah daerah 		<p>positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p>
6	(Sanjaya 2017)	<p><u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengendalian Intern - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Sumber Daya Manusia - Komitmen Organisasi 	<p>1. Sampel seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar sebanyak 32 SKPD</p> <p>2. Alat analisis regresi berganda</p>	<p>1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>4. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p>
7.	(Kesuma, Anwar, and	<p><u>Variabel dependen:</u></p>	<p>1. Sampel 100 pegawai</p>	<p>1. Good governance</p>

	Darmansyah 2017b)	<p>Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Good governance - Standar akuntansi pemerintah - Sistem pengendalian internal - Kompetensi aparatur pemerintah 	<p>satuan kerja Kementerian pariwisata</p> <p>2. Alat analisis regresi berganda</p>	<p>secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>4. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
8.	(Jauhari, Dewata, and Suhairi Hazisma 2021)	<p><u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan 	<p>1. 46 pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</p>	<p>1. penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh</p>

		<p>Standar Akuntansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Sistem Pengendalian Internal - Penerapan Kompetensi Staf Akuntansi 	<p>Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia</p> <p>2. Model analisis regresi yang digunakan adalah Moderated Regresion Analysis (MRA).</p>	<p>positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah,</p> <p>2. sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah</p> <p>3. sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	(Gusherinsya and Samukri 2020)	<p><u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan</p> <p><u>Variabel Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem akuntansi keuangan 	<p>1. Sampel 47 pegawai di PT. CSM Cargo.</p> <p>2. uji analisis regresi linier sederhana,</p>	<p>penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
10.	(Inapty, Adha, and Sri Pancawati Martiningsih 2016)	<p><u>Variabel Dependen :</u> Kualitas informasi laporan keuangan.</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan 	<p>1. Sampel seluruh pegawai negeri sipil di SKPD Pemprov NTB</p> <p>2. Alat</p>	<p>1. Penerapan standar akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan</p>

		Standar Akuntansi Pemerintah - Kompetensi Aparatur - Peran Audit Internal	analisis regresi berganda	keuangan; 2. Kompetensi aparatur berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan; 3. Peran Audit Internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
--	--	---	---------------------------	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan *Stewardship theory*, pihak eksekutif berusaha untuk membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas, mewujudkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan penerapan standar akuntansi pemerintah. Dengan penerapan SAP tersebut maka laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah SAP.

Hasil penelitian (Azlim, Darwanis, and Bakar 2012; Suhardjo 2013) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik penerapan standar akuntansi, maka semakin

baik pula kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ikhsan 2018) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis:

H1 : Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.1.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PNSD profesional dibutuhkan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Berdasarkan *Stewardship theory* diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Schillemans and Bjurström 2020). Laporan keuangan sebuah produk dihasilkan oleh bidang dan disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian (Oktarina, Raharjo, and Andini 2016) membuktikan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kesuma, Anwar, and Darmansyah 2017b) yang membuktikan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis :

H2 : Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.1.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Berdasarkan *Stewardship theory*, pihak eksekutif (pemerintah daerah) harus bisa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara menerapkan *Good Governance* yang baik termasuk dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian (Khairaningrum Mulyanti and Rahma 2020) membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Oktarina, Raharjo, and Andini 2016; Rasinta 2017) yang membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis :

H3 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.1.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur segala aktifitas dalam pencatatan keuangan daerah, mulai dari proses pembuatan, pencatatan, pelaporan, hingga pada pertanggungjawaban, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengatur bagaimana suatu keuangan daerah menjadi lebih terstruktur, terarah, berkualitas dan dapat dipahami dengan mudah serta mampu dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan *Stewardship theory*, pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, memerlukan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian (Sanjaya 2017) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik sistem informasi akuntansi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis :

H4 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.1.5 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *Stewardship theory*, pihak eksekutif (pemerintah daerah) dalam memenuhi kewajibannya dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, memerlukan adanya teknologi informasi yang lebih baik, teknologi informasi bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penganbilan keputusan sehingga organisasi dapat mengambil keuntungan dan kesempatan dengan menggunakan informasi tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengeluarkan dananya untuk membuat teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian teknologi informasi merupakan suatu produk dalam bidang teknologi yang dapat membantu memberikan informasi dengan cepat, termasuk di dalamnya dalam memebrikan informasi tentang unsur-unsur yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Hasil penelitian (Rahmawati, Mustika, and Eka 2018) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis :

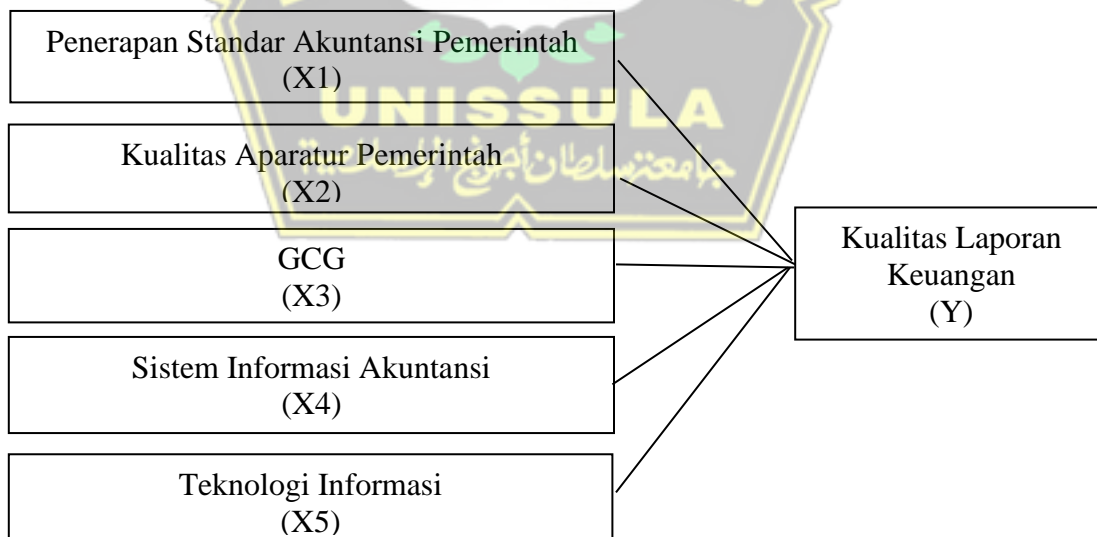
H5 : Tekonologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.4 Kerangka Penelitian

Stewardship theory menyatakann bahwa para eksekutif cenderung akan semaakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan organisasi dibandingkan

dengan kepentingan mereka sendiri (Donaldson and Davis 1991; Schillemans and Bjurstrøm 2020). Hubungan *Stewardship theory* dengan kualitas laporan keuangan daerah ketika eksekutif sebagai *steward* bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkannya pihak eksekutif berusaha membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas, dengan mewujudkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah, aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi serta teknologi informasi yang baik (Schillemans and Bjurstrøm 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2017: 6), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang menjelaskan definisi variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini menekankan pada hubungan antara variabel penelitian dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesis dengan harapan yang pada akhirnya dapat memperkuat teori yang dijadikan sebagai pijakan. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan; standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat disebut juga suatu atribut maupun sifat atau nilai dari orang, obyek dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Indriantoro & Supomo, 2016). Variabel merupakan sesuatu yang dijadikan perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lima variabel independen.

3.2.1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi apabila variabel tersebut dihubungkan dengan variabel independen (variabel bebas) (Indriantoro dan Supomo, 2016). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Variabel dependen bisa disimbolkan dengan (Y).

3.2.2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen atau disebut variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai sebab timbulnya perubahan dari variabel dependen (Indriantoro & Supomo, 2016). Variabel independen yang diuji yaitu standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah, *good corporate governance* sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi. Variabel independen bisa disimbolkan dengan (X).

3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan kriteria variabel yang diamati. Batasan operasional variabel tersebut didasarkan atas sifat yang dapat didefinisikan, diamati dan diobservasi, (Indriantoro & Supomo, 2016). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

SAP tersebut sebagai landasan hukum bagi aparaturnya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat diukur menggunakan skala likert, dengan dimensi yang dikembangkan oleh Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi Aset Tetap, Catatan Atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Laporan Arus Kas, Koreksi Kesalahan, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Operasional Akuntansi Investasi, Laporan Operasional, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan Akuntansi Kewajiban (Kesuma et al., (2017).

2) Kualitas Aparatur Pemerintah

Kualitas aparaturnya pemerintah wajib dimiliki oleh aparaturnya berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan serta perilaku yang dibutuhkan pelaksanaan tugasnya (Inapty, Adha, and Sri Pancawati Martiningsih 2016). Kualitas aparaturnya yang memadai akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA. Kesuma et al., (2017) Kualitas aparaturnya pemerintah dapat diukur dengan skala likert dengan dimensi yaitu Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap.

3) *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien (Oktarina, Raharjo, and Andini 2016). Kesuma et al., (2017) *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan skala likert dengan dimensi: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

4) **Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan (Ikhsan 2018). Kesuma et al., (2017) Sistem informasi akuntansi diukur dengan menggunakan skala *likert*, dengan dimensi: akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap.

5) **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan suatu kombinasi dari teknologi komputerisasi dan komunikasi dalam bentuk sistem perangkat lunak dan perangkat keras (Pradnya Paramitha and Dharmadiaksa 2019). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi ataupun entitas, salah satunya dalam menyusun laporan keuangan . Rika Krisnawati (2019). Teknologi

informasi diukur dengan menggunakan skala *likert*, dengan dimensi pemanfaatan dan efektivitas.

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) : Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan yaitu ukuran normatif perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dapat memenuhi tujuannya. Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan (Zulkarnain and Ningrum 2020). Rika Krisnawati (2019). Kualitas laporan keuangan diukur dengan dimensi: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel didalam penelitian ini terdiri dari variable exogenous dan endogenous dengan definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

No	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Sumber
1.	Kualitas laporan keuangan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.	1. dapat dipahami, 2. relevan, 3. keandalan, 4. dapat dibandingkan.	Rika Krisnawati (2019).

2.	<p>Teknologi informasi suatu kombinasi dari teknologi komputerisasi dan komunikasi dalam bentuk sistem perangkat lunak dan perangkat keras</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan 2. efektivitas 	Rika Krisnawati (2019).
3.	<p>Sistem Informasi Akuntansi sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. akurat, 2. relevan, 3. tepat waktu, 4. lengkap. 	Kesuma et al., (2017)
4.	<p>Good Corporate Governance suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi, 5. Kewajaran., 	Kesuma et al., (2017)
5	<p>Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Arus Kas; 3. Catatan Atas Laporan Keuangan; 4. Akuntansi Persediaan; 5. Akuntansi Investasi; 6. Akuntansi Aset Tetap; 7. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan; 8. Akuntansi Kewajiban; 9. Koreksi Kesalahan; 	Kesuma et al., (2017)

		10. Laporan Keuangan Konsolidasi 11. Laporan Operasional	
6	Kualitas Aparatur Pemerintah Kualitas aparatur pemerintah adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya	1. objektif; 2. terukur; 3. akuntabel; 4. partisipatif; 5. transparan.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

3.4 Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Populasi menurut (Sugiyono 2017) dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi berupa objek atau subjek yang terdapat kualitas serta ciri tertentu dan ditetapkan peneliti untuk dipelajari serta diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD di Kabupaten Demak.

Sampel dapat diartikan bagian dari beberapa jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan populasi diambil harus mewakili atau *representative* (Sugiyono 2017). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang diambil dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *sensus*. Teknik Sensus sampling atau sampling jenuh menurut Sugiyono (2012: 68) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel, yaitu PNS seluruh SKPD di Kabupaten Demak yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya (Sugiyono 2018). Data penelitian berupa jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner dari responden secara langsung kepada bendahara, Kasubag Keuangan dan Staf pada bagian akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner), yang akan diisi atau dijawab oleh responden pada masing-masing SKPD. Kuesioner terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan umum (Identitas responden), sedangkan bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan berkaitan dengan variabel penelitian yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparat pemerintah daerah, *good corporate governance*, sistem informasi akuntansi, serta teknologi informasi.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas yaitu uji yang dapat digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner dapat menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui apabila kuesioner yang digunakan valid atau tidak, maka digunakan *Pearson Correlation* (Korelasi Produk Momen Pearson). Analisis dengan cara mengkorelasikan masing skor item dengan skor total. Jika hasil uji validitas menunjukkan nilai signifikan berada dibawah 0.05 maka dapat dianggap valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable. Kuesioner dikatakan reliable dan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan yaitu konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal, sebaliknya jika koefisien *Cronbach Alpha* \leq 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum

melakukan analisis lebih lanjut data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi Kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan andal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Analisis Statistik menurut Ghozali (2018) Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilaksanakan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh menggunakan taraf signifikansi α 0,05. Apabila $p \text{ value} > \alpha$, maka data berdistribusi normal, jika $p \text{ value} < \alpha$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *varianceinflation factor* (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Sehingga nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *Cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 . Sehingga bisa dikatakan jika nilai tolerance kurang dari 0.10, dan nilai VIF lebih besar 10, maka terjadi multikolonieritas. Dan sebaliknya jika variabel independen mempunyai angka tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10 maka dikatakan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolonieritas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2018). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut Homoskedastisitas, jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas, data ini menghimpun data yang mewakili beberapa ukuran (kecil, sedang, besar). Ghozali (2018) Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan Uji Glejser, pada uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sehingga data tidak ada indikasi heteroskedastisitas

jika nilai probabilitas atau nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau lebih dari 0.05.

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Setelah data diperoleh, agar dapat diberikan gambaran secara umum, maka data akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan bantuan program pengolah data statistik yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

β_2 = Koefisien Regresi Kualitas Aparat Pemerintah Daerah

β_3 = Koefisien Regresi *Good Corporate Governance*

β_4 = Koefisien Regresi Sistem Informasi Akuntansi

β_5 = Koefisien Regresi Teknologi Informasi

X_1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X_2 = Kualitas Aparat Pemerintah Daerah

X_3 = *Good Corporate Governance*

X_4 = Sistem Informasi Akuntansi

X_5 = Teknologi Informasi

e = *Error*

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik F *mengukur goodness of fit*, yaitu tingkat ketepatan fungsi dari regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Ujistatistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Ujistatistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali 2018). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variable dependen (Ghozali 2018).

3.7.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018), Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel

bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.7.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual atau Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), Uji t atau uji parsial yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam penelitian ini. Hipotesis yang digunakan untuk menguji sebagai berikut:

Ho: $b_i = 0$

Ha: $b_i \neq$ tidak 0

Ghozali (2018) Apabila Ho ditolak maka Ha diterima, artinya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 5% dan arah koefisien β sesuai dengan arah hipotesis, maka hipotesis alternatif dapat diterima dan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas lebih besar dari 5% maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif ditolak (Ha) artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang berjumlah 78 orang responden. Untuk penyebaran kuesioner dilaksanakan dengan menyebarkan langsung kepada responden. Berikut ini ringkasan jumlah penyebaran kuesioner dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan kepada responden	78
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan kepada peneliti, dimungkinkan karena urusan tidak bisa melengkap	-
3	Kuesioner yang dinyatakan tidak dapat diolah, dikarenakan pengisiannya tidak lengkap	-
4	Kuesioner yang layak untuk diolah	78
<i>Response rate = 78/78*100%= 100%</i>		

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Kuesioner didistribusikan dengan mengantar langsung kepada PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak sebanyak 78 eksemplar. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 78 eksemplar dan seluruhnya diisi secara lengkap dan benar. Dengan demikian tingkat *response rate* kuesioner adalah sebesar 100 persen.

Pada Sub ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang mencakup identitas responden meliputi pendidikan, jenis kelamin dan usia serta masa kerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian pada PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan, dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Gender

Data karakteristik responden berdasarkan gender dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2

Gender Responden

No	Gender	Jumlah	Presentasi (%)
1	Laki-laki	34	44
2	Perempuan	44	56
Jumlah		78	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 4.2 PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak didominasi dengan jenis kelamin perempuan sebesar 56% responden dan laki-laki sebesar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang didominasi perempuan yang memiliki sifat teliti dan lebih pemilih sehingga akan menjadi lebih teliti dalam melakukan pembukuan, inputing data keuangan dan melakukan laporan keuangan.

4.1.2 Diskripsi Responden Usia

Data karakteristik Usia Responden dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Usia Responden

tNo	Usia	Jumlah	Presentasi (%)
1	≤ 30 Tahun	3	4
2	31 s/d 40 tahun	32	41
3	41 s/d 50 tahun	38	49
4	> 50 tahun	5	6
	Jumlah	78	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 4.3 Usia PNS atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak didominasi dengan usia 41 s/d 50 tahun yaitu 38 responden atau sebesar 49% dan usia 31 s/d 40 tahun sebanyak 32 responden atau sebesar 41% yang menunjukkan bahwa responden merupakan ASN yang

telah memiliki kematangan usia, sehingga dipandang mampu menjabat sebagai bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi.

4.1.3 Diskripsi Tingkat Pendidikan

Data karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentasi (%)
1	SMA	0	0
2	Diploma	6	8
3	Sarjana (S1)	26	33
4	Pascasarjana / S2	46	59
5	Doktor /S3	0	0
	Jumlah	78	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan dari sampel yang berjumlah 78 responden yang berpendidikan Diploma sebesar 8%; Sarjana (S1) sebesar 33% dan Pascasarjana 59%. Responden didominasi oleh lulusan Pasca Sarjana (S2) yaitu 46 orang yang menunjukkan bahwa PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak merupakan ASN yang memiliki pengetahuan tinggi dan mampu menerima informasi terkait dengan keuangan. Sehingga responden mampu memiliki pengetahuan keuangan yang baik sehingga terhindar dari

kesalahan persepsi dan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam pembukuan.

4.1.4 Deskripsi Masa Kerja

Data karakteristik responden berdasarkan Lama Usaha dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Lama Bekerja

No	Lama Usaha	Jumlah	Presentasi (%)
1	≤ 10 Tahun	8	10
2	10 s/d 20 tahun	26	33
3	20 s/d 30 tahun	38	49
4	> 30 tahun	6	8
	Jumlah	78	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan masa kerja dari sampel yang berjumlah 78 responden masa kerja 5 s/d 10 tahun ada 8 responden (10%); 10 s/d 20 tahun ada 26 responden (33%); masa kerja 20 - 30 tahun adalah 38 responden (49%) dan masa kerja lebih dari 30 tahun ada 6 responden (8%). Responden didominasi oleh PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak merupakan ASN yang telah bekerja selama 20 - 30 tahun yang artinya adalah PNS yang memiliki jabatan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak telah memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep keuangan dan mampu menganalisis kondisi keuangan organisasinya dengan lebih baik.

4.2 Deskripsi Variabel

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan antara lain Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), *Good Corporate Governance* (X3), Sistem Informasi Akuntansi (X4), Teknologi Informasi (X5) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Persepsi responden mengenai variabel yang diteliti pada studi ini menggunakan kriteria rentang sebesar $(5-1)/3 = 1,33$, (Chin, 1998) oleh karena itu interpretasi nilai adalah sebagai berikut:

1,00 - 2,33 = Rendah

2,34 - 3,66 = Sedang

3,67 - 5,00 = Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian di SKPD di Kabupaten Demak masing-masing deskripsi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), *Good Corporate Governance* (X3), Sistem Informasi Akuntansi (X4), Teknologi Informasi (X5) sebagai variabel eksogen serta Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variable endogen adalah sebagai berikut :

4.2.1. Analisis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi Aset Tetap,

Catatan Atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Laporan Arus Kas, Koreksi Kesalahan, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Operasional Akuntansi Investasi, Laporan Operasional, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan Akuntansi Kewajiban ((Kesuma, Anwar, and Darmansyah 2017a).

Adapun hasil jawaban indikator Penerapan Standar Akuntansi secara lebih rinci ditampilkan dalam tabel 4.6. berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Jawaban Indikator Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	Laporan Realisasi Anggaran	4,08	Tinggi
2	Laporan Arus Kas	4,12	Tinggi
3	Catatan Atas Laporan Keuangan	4,14	Tinggi
4	Akuntansi Persediaan	4,23	Tinggi
5	Akuntansi Investasi	4,05	Tinggi
6	Akuntansi Aset Tetap	3,85	Tinggi
7	Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,53	Sedang
8	Akuntansi Kewajiban	4,42	Tinggi
9	Koreksi Kesalahan	4,06	Tinggi
10	Laporan Keuangan Konsolidasi	4,22	Tinggi
11	Laporan Operasional	4,00	Tinggi
Rata-rata nilai variable		4,06	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 4,02 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori tinggi atau baik.

Jawaban tertinggi pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah indikator akuntansi kewajiban, hal ini menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak memahami Sistem akuntansi kewajiban (liabilitas) dengan baik. Sedangkan indikator terendah adalah Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan hal tersebut menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak belum dapat melakukan pencatatan dan pembukuan terkait aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan sesuai target karena terkendala penyelesaian pekerjaan yang tertunda karena refocusing anggaran akibat pandemic Covid 19.

4.2.2. Analisis Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel Kualitas Aparatur Pemerintah di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian ini digunakan 3 pernyataan yang diambil dari indikator yaitu : Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap.

Adapun hasil jawaban indikator Kualitas Aparatur Pemerintah secara lebih rinci ditampilkan dalam tabel 4.7. berikut :

Tabel 4. 7**Hasil Jawaban Indikator Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah**

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	Pengetahuan,	4,21	Tinggi
2	Keterampilan,	4,26	Tinggi
3	Sikap.	4,26	Tinggi
Rata-rata nilai variabel		4,2	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden variabel Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 4,2 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori tinggi atau baik.

Jawaban variabel Kualitas Aparatur Pemerintah tertinggi adalah indikator keterampilan dan sikap. Hal ini menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak merupakan aparat pemerintah yang memiliki keterampilan yang baik dan capable dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indikator terendah variabel Kualitas Aparatur Pemerintah adalah pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak masih harus meningkatkan pengetahuan bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsinya.

4.2.3. Analisis Variabel *Good Corporate Governance*

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel *Good Corporate Governance* di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian ini digunakan 5 pernyataan yang diambil dari indikator yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

Adapun hasil jawaban indikator *Good Corporate Governance* secara lebih rinci ditampilkan dalam tabel 4.8. berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Jawaban Indikator Variabel *Good Corporate Governance*

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	Transparansi,	3,90	Tinggi
2	Akuntabilitas,	4,13	Tinggi
3	Responsibilitas,	3,96	Tinggi
4	Independensi,	3,51	Sedang
5	Kewajaran.,	3,00	Sedang
Rata-rata nilai variabel		3,70	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.8 menunjukkan keseluruhan jawaban responden variabel *Good Corporate Governance* sebesar 3,70 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa *Good Corporate Governance* pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori tinggi.

Indikator tertinggi variabel *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas yang diwujudkan dengan kemampuan mengambil keputusan dan sikap yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik

praktis, melayani secara adil dan konsisten dalam menjalankan pilihan dan fungsi dalam pelaporan keuangan.

Sedangkan variabel terendah variabel *Good Corporate Governance* adalah kewajaran hal ini menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Demak harus memastikan segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.

4.2.4. Analisis Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel *Sistem Informasi Akuntansi* di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian ini digunakan 4 pernyataan yang diambil dari indikator yaitu akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap.

Adapun hasil jawaban indikator *Good Corporate Governance* secara lebih rinci ditampilkan dalam tabel 4.9. berikut :

Tabel 4.9
Hasil Jawaban Indikator Variabel Sistem Informasi Akuntansi

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	akurat,	3,10	Sedang
2	relevan,	3,90	Tinggi
3	tepat waktu,	3,99	Tinggi
4	lengkap.	3,86	Tinggi
Rata-rata nilai variabel		3,71	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden variabel *Sistem Informasi Akuntansi* sebesar 3,71 yang menunjukkan sebagian

besar responden menilai bahwa *Sistem Informasi Akuntansi* pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori tinggi atau baik.

Indikator tertinggi variabel *Sistem Informasi Akuntansi* adalah tepat waktu hal ini menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak merupakan aparat pemerintah yang mampu mengukur output dan outcome kinerjanya dengan baik dan menjalankan kewajibannya tepat waktu.

Sedangkan variabel terendah variabel *Sistem Informasi Akuntansi* adalah akurat hal ini menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak harus meningkatkan akurasi pekerjaannya dalam pelaporan keuangan.

4.2.5. Analisis Variabel Teknologi Informasi

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel Teknologi Informasi di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian ini digunakan 2 pernyataan yang diambil dari indikator yaitu : pemanfaatan dan efektivitas.

Adapun hasil jawaban indikator Teknologi Informasi secara lebih rinci ditampilkan dalam berikut :

Tabel 4. 10

Hasil Jawaban Indikator Variabel Teknologi Informasi

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	pemanfaatan	3,12	Sedang
2	Efektivitas	3,04	Sedang
Rata-rata nilai variabel		3,08	Sedang

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden variabel Teknologi Informasi sebesar 3,08 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa Teknologi Informasi pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan pelaporan keuangan oleh bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak belum sepenuhnya optimal.

Indikator tertinggi variabel Teknologi Informasi adalah pemanfaatan hal ini menunjukkan bahwa bendahara, kasubag keuangan dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak telah memanfaatkan Teknologi Informasi untuk pelaksanaan tugas dalam pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan variabel terendah variabel teknologi informasi adalah efektivitas hal ini menunjukkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaporan keuangan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan kurangnya tenaga IT yang mampu membantu jika terdapat kendala malware dan eror dalam aplikasi pelaporan keuangan.

4.2.6. Analisis Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Guna mengungkap tanggapan responden mengenai variabel Kualitas Laporan Keuangan di SKPD di Kabupaten Demak dalam penelitian ini digunakan 4 pernyataan yang diambil dari indikator yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan serta dapat dibandingkan.

Adapun hasil jawaban indikator Kualitas Laporan Keuangan secara lebih rinci ditampilkan dalam tabel 4.11 berikut :

Tabel 4. 11
Hasil Jawaban Indikator Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	dapat dipahami,	3,12	Sedang
2	relevan,	3,13	Sedang
3	keandalan,	3,18	Sedang
4	dapat dibandingkan.	3,14	Sedang
Rata-rata nilai variable		3,14	Sedang

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 3,14 yang menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kabupaten Demak masuk kategori sedang. Hasil ini dikarenakan bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi masih dalam fase penyesuaian akan peraturan dan perubahan SOP pelaporan Keuangan pemerintah yang terintegrasi secara nasional dengan tata cara dan aturan yang baru. Sehingga bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian

akuntansi pada SKPD di Kabupaten Demak masih perlu meningkatkan pemahaman terkait perubahan regulasi dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Indikator tertinggi variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak dapat diandalkan untuk menilai kinerja SKPD.

Sedangkan variabel terendah variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara, kasubag keuangan, dan staf bagian akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak sesuai dengan aturan baru kurang dapat dipahami masyarakat karena lebih rumit.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas menguji setiap variabel dalam penelitian ini. Semua variabel penelitian terdapat 31 pernyataan yang dijawab oleh responden. Kriteria untuk menentukan valid atau tidaknya pernyataan dalam penelitian ini yaitu tingkat kepercayaan = 95% ($\alpha = 5$ persen), derajat kebebasan ($df = n - 2$), diperoleh r tabel = 0,222 (uji dua sisi). Jika r hitung (nilai *pearson correlation*) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid .

Tabel 4. 12
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Kode Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah		X1.1	0,723	0,222	Valid
		X1.2	0,720	0,222	Valid
		X1.3	0,622	0,222	Valid
		X1.4	0,684	0,222	Valid
		X1.5	0,722	0,222	Valid
		X1.6	0,768	0,222	Valid
		X1.7	0,690	0,222	Valid
		X1.8	0,685	0,222	Valid
		X1.9	0,803	0,222	Valid
		X1.10	0,603	0,222	Valid
		X1.11	0,683	0,222	Valid
Kualitas Aparatur Pemerintah		X2.1	0,834	0,222	Valid
		X2.2	0,617	0,222	Valid
		X2.3	0,875	0,222	Valid
		X2.4	0,849	0,222	Valid
		X2.5	0,764	0,222	Valid
<i>Good Corporate Governance</i>		X3.1	0,694	0,222	Valid
		X3.2	0,774	0,222	Valid
		X3.3	0,779	0,222	Valid
		X3.4	0,604	0,222	Valid
		X3.5	0,623	0,222	Valid
Sistem Informasi Akuntansi		X4.1	0,684	0,222	Valid
		X4.2	0,812	0,222	Valid
		X4.3	0,873	0,222	Valid
		X4.4	0,838	0,222	Valid
Teknologi Informasi		X5.1	0,899	0,222	Valid
		X5.2	0,894	0,222	Valid
Kualitas Laporan Keuangan		Y1.1	0,726	0,222	Valid
		Y1.2	0,645	0,222	Valid
		Y1.3	0,601	0,222	Valid
		Y1.4	0,637	0,222	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui bahwa nilai r hitung dari semua indikator lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam penelitian ini adalah valid (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas Data

Uji reabilitas pada pengujian menggunakan *Cronbach Alpha*, jika *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka kuesioner dikatakan konsisten atau reliabel (Ghozali, 2018). Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS masing-masing variabel mempunyai nilai $> 0,6$ alpha sebagaimana nampak pada Tabel 4.13, Maka kuesioner dalam penelitian ini adalah konsisten atau reliabel.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,884	Reliabel
2	Kualitas Aparatur Pemerintah	0,828	Reliabel
3	Good Corporate Governance	0,699	Reliabel
4	Sistem Informasi Akuntansi	0,811	Reliabel
5	Teknologi Informasi	0,756	Reliabel
6	Kualitas Laporan Keuangan	0,654	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

(Ghozali, 2011). Multikolinieritas dalam model regresi pada penelitian ditentukan berdasarkan nilai VIF (variance inflation factor) dan tolerance. Adapun nilai VIF dapat dilihat pada Tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4. 14
Uji Multikolinearitas

No	Variabel Terikat	Variabel Bebas	Tolerance	VIF
1.	Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,249	4,013
		Kualitas Aparatur Pemerintah	0,293	3,418
		<i>Good Corporate Governance</i>	0,462	2,167
		Sistem Informasi Akuntansi	0,796	1,257
		Teknologi Informasi	0,781	1,280

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 4.14 hasil perhitungan menunjukkan bahwa tolerance masing masing variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (0,249); Kualitas Aparatur Pemerintah (0,293); *Good Corporate Governance* (0,462); Sistem Informasi Akuntansi (0,796) dan Teknologi Informasi (0,781) berada diatas 10 %. Sedangkan nilai VIF masing masing variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (4,013); Kualitas Aparatur Pemerintah (3,418); *Good Corporate Governance* (2,167); Sistem Informasi Akuntansi (1,257) dan Teknologi Informasi (1,280) berada dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak ada multikolinieritas dalam penelitian ini terpenuhi.

b. Heterokedastisitas

Tujuan dilakukannya uji *heterokedastisitas* adalah agar model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga dapat dilakukan ke uji selanjutnya. Berikut hasil pengujian *heterokedastisitas* dengan menggunakan uji *Glejser* dengan meregresikan variabel bebas dengan nilai *absolute* dari *unstandardized residuals*. Hasil dari uji *Glejser* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 15

Uji Glejser

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstd Coeff		Std Coef Beta	T	p-value (sig)
		B	SE			
Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,046	0,029	0,359	1,562	0,123
	Kualitas Aparatur Pemerintah	-0,073	0,053	-0,295	-1,390	0,169
	<i>Good Corporate Governance</i>	-0,064	0,056	-0,192	-1,136	0,260
	Sistem Informasi Akuntansi	0,020	0,041	0,064	0,498	0,620
	Teknologi Informasi	0,008	0,093	0,012	0,091	0,927

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji *Glejser*, nilai signifikansi dari variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah $0,123 > 0,05$; Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar $0,169 > 0,05$; variable *Good Corporate Governance* sebesar $0,260 > 0,05$; dan variable Sistem Informasi Akuntansi sebesar $0,620 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan model regresi ini bebas dari heteroskedastisitas.

c. Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Pengujian ini menggunakan *uji Kolmogorov – Smirnov* . Uji Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang sering dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Dasar uji normalitas Kolmogorov Smirnov yaitu membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku yaitu data yang ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score serta diasumsikan normal. Uji Kolmogorov Smirnov yaitu metode uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 maka ada perbedaan signifikan, jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan signifikan. Penerapan uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan signifikan dengan data normal baku, maka data tersebut tidak normal. Jika signifikansi di atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Hal ini berarti data yang kita uji normal, tidak berbeda dengan normal baku.

Tabel 4. 16
Uji Kolmogorof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23995745
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		1,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,228

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Uji *Kolmogorof Smirnov* ini dilihat pada nilai *Asymp Sig (2-tailed)* jika memiliki nilai di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Pada output dapat dilihat bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* memiliki nilai 0,986 dan $0,982 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3. Regresi Berganda

Berdasarkan perhitungan regresi berganda dengan *software* SPSS, hasilnya nampak pada berikut ini :

Tabel 4. 17
Rangkuman Regresi Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	T hitung	B (unstandardized)	Sig.	Ket
	Constant	3,830	5,843	0,000	Positif
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	1,984	0,118	0,048	Diterima
	Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)	2,092	0,132	0,043	Diterima
	<i>Good Corporate Governance</i> (X3)	2,327	0,268	0,030	Diterima
	Sistem Informasi Akuntansi (X4)	2,084	0,142	0,041	Diterima
	Teknologi Informasi (X5)	4,172	0,645	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan pada Tabel 4.17 maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki hubungan positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas Aparatur Pemerintah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Good Corporate Governance* memiliki hubungan positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Informasi Akuntansi memiliki hubungan positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Teknologi Informasi memiliki hubungan positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dari Tabel 4.17 persamaan regresi linear yang terbentuk adalah

$$Y = 5,843 + 0,118 X1 + 0,132 X2 + 0,268 X3 + 0,142 X4 + 0,645 X5 + e$$

Pada persamaan pertama variabel bebas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X_2), *Good Corporate Governance* (X_3), Sistem Informasi Akuntansi (X_4), dan Teknologi Informasi (X_5) mempunyai tanda positif, artinya jika variabel tersebut meningkat maka variabel terikat yakni Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat.

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 5,843 artinya jika semua variable independent (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah; Kualitas Aparatur Pemerintah; *Good Corporate Governance*; Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi) dianggap tetap atau konstan maka Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 58.43%.
2. Diketahui nilai koefisien beta pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,118 dengan nilai signifikan $0,048 < 0,05$ sehingga variabel Penerapan Standar Akuntansi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan;
3. Nilai koefisien beta pada variabel Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 0,132 dengan nilai signifikan $0,043 < 0,05$, dan nilai t-hitung $2,092 > t$ -tabel 1,99 sehingga variabel Kualitas Aparatur Pemerintah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan;

4. Nilai koefisien beta pada variabel Good Corporate Governance sebesar 0,268 dengan nilai signifikan $0,030 < 0,05$, dan nilai t-hitung $2,327 > t$ -tabel 1,99 sehingga variabel *Good Corporate Governance* mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan;
5. Nilai koefisien beta pada variabel Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,142 dengan nilai signifikan $0,041 < 0,05$, dan nilai t-hitung $2,084 > t$ -tabel 1,99 sehingga variabel Sistem Informasi Akuntansi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan;
6. Nilai koefisien beta pada variabel Teknologi Informasi sebesar 0,645 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan nilai t-hitung $4,172 > t$ -tabel 1,99 sehingga variabel Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan.

4.3.4. Uji Goodness Of Fit

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh pada variabel dependen. Berikut ini hasil Uji Statistik F yang telah dilakukan :

Tabel 4.18
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,792	5	11,758	7,151	,000 ^a
	Residual	118,387	72	1,644		
	Total	177,179	77			

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Good Corporate Governance , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 signifikansi $< 0,05$ artinya penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah, good corporate governance, sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

b. Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar sumbangan model penelitian Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat dari variabel bebas yang meliputi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi berganda (*R-Square*) berikut ini :

Tabel 4. 19
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,576 ^a	,332	,285	1,282

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Good Corporate Governance , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada penelitian ini telah dilakukan uji koefisien determinasi dan dapat dilihat pada tabel 4.19, didapatkan bahwa model penelitian Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.285. Ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 28,5% dan sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam studi ini yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual atau Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan dari tabel 4.17, dapat dilihat hasil-hasil uji t adalah

1. Nilai signifikan $0,048 < 0,05$ dengan arah positif maka **H1 diterima**.
Artinya variabel Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan;
2. Nilai signifikan $0,043 < 0,05$, dengan arah positif maka **H2 diterima**.
Artinya variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan;
3. Nilai signifikan $0,030 < 0,05$, dengan arah positif maka **H3 diterima**.
Artinya variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan;
4. Nilai signifikan $0,041 < 0,05$, dengan arah positif maka **H4 diterima**.
Artinya variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan;
5. Nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dengan arah positif maka **H5 diterima**.
Artinya variabel Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pada Tabel 4.17 berdasarkan perhitungan dengan *software* SPSS, koefisien regresi menunjukkan angka sebesar 0,118 berarti semakin baik Penerapan Standar Akuntansi maka semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Kemudian $t_{hitung} (1,984) > t_{tabel} (1,98)$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,048 < 0,05$. Berarti hipotesis yang diajukan (H_a) diterima, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan Standar Akuntansi dapat mempengaruhi peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Variabel Penerapan Standar Akuntansi dibangun dengan indikator Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi Aset Tetap, Catatan Atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Laporan Arus Kas, Koreksi Kesalahan, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Operasional Akuntansi Investasi, Laporan Operasional, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dan Akuntansi Kewajiban. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dibangun dengan indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Indikator tertinggi Penerapan Standar Akuntansi adalah akuntansi Kewajiban sedangkan indikator tertinggi Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pencatatan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah akan semakin meningkatkan kualitas informasi keuangan secara benar dan valid.

Indikator terendah Penerapan Standar Akuntansi adalah Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan sedangkan indikator terendah Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pencatatan aset-aset tetap Pemerintah yang sedang dalam proses pembangunan akan mendorong pemahaman yang lebih baik akan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik Penerapan Standar Akuntansi, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan (Azlim et al., 2012; Suhardjo, 2013) dan didukung dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Ikhsan, 2018).

Sehingga disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi yang semakin baik akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

4.4.2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian adalah Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pada Tabel 4.17 berdasarkan perhitungan dengan *software* SPSS, koefisien regresi menunjukkan angka sebesar 0,132 berarti semakin baik Kualitas Aparatur Pemerintah maka semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Kemudian t hitung (2,092) > t -tabel (1,98) dengan tingkat signifikan sebesar $0,043 < 0,05$. Berarti hipotesis yang diajukan (H_a) diterima, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Kualitas Aparatur Pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah dibangun dengan indikator objektif; terukur; akuntabel; partisipatif dan transparan. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dibangun dengan indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Indikator tertinggi Kualitas Aparatur Pemerintah adalah terukur dan akuntabel sedangkan indikator tertinggi Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin terukur dan akuntabel bendahara, Kasubag Keuangan dan Staf bagian akuntansi akan mendorong keandalan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Indikator terendah

Kualitas Aparatur Pemerintah adalah transparan sedangkan indikator terendah Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami. Semakin bendahara, Kasubag Keuangan dan Staf bagian akuntansi memiliki transparansi dalam bekerja maka akan meningkatkan pemahaman dalam membaca Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, semakin baik Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan (Oktarina et al., 2016). Hasil ini didukung oleh penelitian yang membuktikan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Kesuma et al., 2017a).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah yang semakin baik akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

4.4.3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pada Tabel 4.17 berdasarkan perhitungan dengan *software* SPSS, koefisien regresi menunjukkan angka sebesar 0,268 berarti semakin baik

Good Corporate Governance maka semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Kemudian t hitung (2,327) > t -tabel (1,98) dengan tingkat signifikan sebesar $0,030 < 0,05$. Berarti hipotesis yang diajukan (H_a) diterima, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Variabel *Good Corporate Governance* dibangun dengan indikator Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dibangun dengan indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Indikator tertinggi *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas sedangkan indikator tertinggi Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin akuntabel laporan keuangan yang dihasilkan maka akan semakin dapat diandalkan sebagai pengambilan keputusan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Indikator terendah *Good Corporate Governance* adalah kewajaran sedangkan indikator terendah Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman akan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak maka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Khairaningrum Mulyanti & Rahma, 2020) dan didukung dengan penelitian yang membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Oktarina et al., 2016; Rasinta, 2017).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* yang semakin baik akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

4.4.4. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian adalah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pada Tabel 4.17 berdasarkan perhitungan dengan *software* SPSS, koefisien regresi menunjukkan angka sebesar 0,142 berarti semakin baik Sistem Informasi Akuntansi maka semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Kemudian t hitung (2,084) > t -tabel (1,98) dengan tingkat signifikan sebesar $0,041 < 0,05$. Berarti hipotesis yang diajukan (H_a) diterima, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Informasi Akuntansi dapat

mempengaruhi peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Variabel Sistem Informasi Akuntansi dibangun dengan indikator akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dibangun dengan indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Indikator tertinggi Sistem Informasi Akuntansi adalah tepat waktu sedangkan indikator tertinggi Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan. Semakin tepat waktu laporan keuangan maka akan semakin dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Indikator terendah Sistem Informasi Akuntansi adalah akurat sedangkan indikator terendah Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman laporan keuangan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak harus mendorong penggunaan Sistem Informasi Akuntansi secara akurat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik sistem informasi akuntansi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Sanjaya, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang semakin baik akan

berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

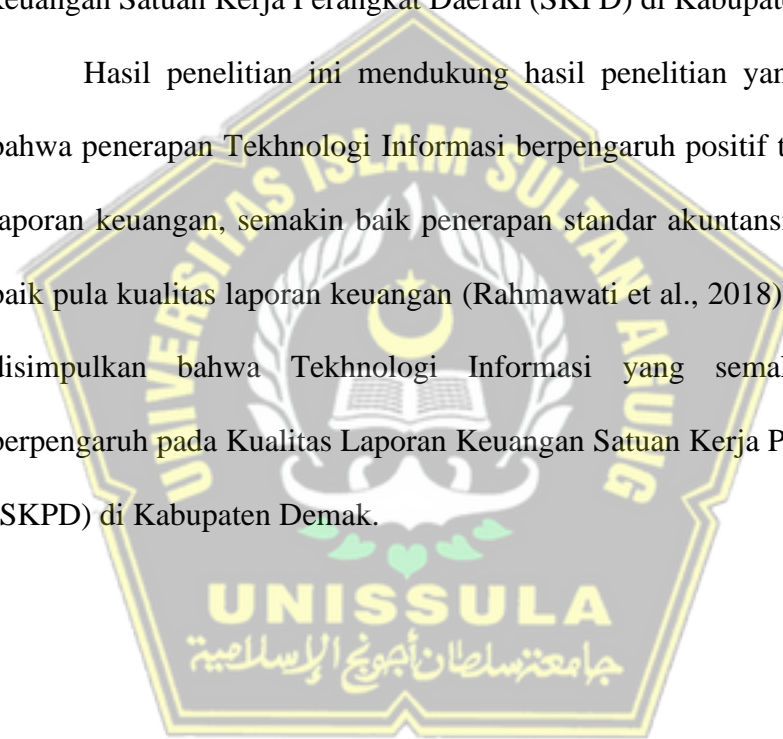
4.4.5. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian adalah Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pada Tabel 4.17 berdasarkan perhitungan dengan *software* SPSS, koefisien regresi menunjukkan angka sebesar 0,645 berarti semakin baik Teknologi Informasi maka semakin meningkat Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Kemudian t hitung (4,172) > t -tabel (1,98) dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berarti hipotesis yang diajukan (H_a) diterima, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Teknologi Informasi dapat mempengaruhi peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Variabel Teknologi Informasi dibangun dengan indikator pemanfaatan dan efektivitas. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan dibangun dengan indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Indikator tertinggi Teknologi Informasi adalah pemanfaatan sedangkan indikator tertinggi Kualitas Laporan Keuangan adalah keandalan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak

akan meningkatkan keandalan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Indikator terendah Teknologi Informasi adalah efektivitas sedangkan indikator terendah Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami. Semakin efektif Teknologi Informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan akan mendorong pemahaman laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa penerapan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik penerapan standar akuntansi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan (Rahmawati et al., 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi yang semakin baik akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, Good Corporate Governance, Sistem Informasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu :

5.1. Kesimpulan

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Semakin baik pengakuan, penilaian dan penyajian laporan keuangan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
2. Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Semakin baik kualitas aparatur pemerintah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan.
3. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Semakin baik *Good Corporate Governance* maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

4. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Semakin baik sistem informasi akuntansi maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
5. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak. Semakin baik teknologi informasi laporan keuangan, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih tidak terlepas dari keterbatasan yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan keterbatasan tersebut antara lain yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu kabupaten yaitu di SKPD Kabupaten Demak sehingga belum dapat digeneralisasikan.
2. Rentan terjadi ketidakjujuran dalam pengisian kuisioner.

5.3. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran, yaitu

1. Untuk penelitian berikutnya harus ditambahkan metode wawancara dalam upaya pengumpulan data untuk menghindari kemungkinan bias dalam mengisi kuisioner.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah dan memperluas lokasi survey penelitian.
3. Penelitian ini belum memperhatikan faktor lain seperti literasi keuangan petugas laporan keuangan (I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi:2021).

Saran bagi Pemerintah Daerah yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

1. Terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, indikator tertinggi adalah akuntansi kewajiban, hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus memastikan petugas akuntansi dapat memahami Sistem Akuntansi Kewajiban (liabilitas) dengan baik. Sedangkan indikator terendah adalah Akuntansi Konstruksi.
2. Terkait variabel Kualitas Aparatur Pemerintah nilai tertinggi adalah indikator keterampilan dan sikap. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempertahankan keterampilan petugas pelaporan keuangan yang baik dan capable dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Terkait variabel *Good Corporate Governance* indikator tertinggi adalah akuntabilitas sehingga organisasi harus mempertahankan akuntabilitas petugas pelaporan keuangan. Sedangkan variabel terendah variabel *Good Corporate Governance* adalah kewajaran hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus meningkatkan pelaporan keuangan dengan memperhatikan asas kewajaran.

4. Terkait variabel Sistem Informasi Akuntansi indikator tertinggi adalah tepat waktu hal ini menunjukkan bahwa harus mempertahankan output dan outcome kerjanya dengan baik dan menjalankan kewajibannya tepat waktu. Sedangkan variabel terendah variabel Sistem Informasi Akuntansi adalah akurat hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus meningkatkan akurasi pekerjaannya dalam pelaporan keuangan.
5. Terkait variabel Teknologi Informasi indikator tertinggi adalah pemanfaatan hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempertahankan kemampuan petugas pelaporan keuangan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi untuk pelaksanaan tugas dalam pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan variabel terendah variabel Teknologi Informasi adalah efektivitas hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus meningkatkan efektivitas pemanfaatan IT dalam melakukan pelaporan keuangan.
6. Terkait variabel Kualitas Laporan Keuangan indikator tertinggi adalah keandalan hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus mempertahankan keandalan laporan keuangannya. Sedangkan variabel terendah variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah dapat dipahami hal ini menunjukkan bahwa organisasi harus meningkatkan pemahaman akan regulasi baru terkait pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z. 2020. "Pengaruh Persepsi Atas Tujuan Laporan Keuangan Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Umkm Di Kota Sungai Penuh Tahun 2020." *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 9(2): 229–38. <http://jes.stie-sak.ac.id/index.php/103044/article/view/208>.
- Armel, R., A. Nasir, and D. Safitri. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4(1): 105–19.
- Aryani, Ni Ketut Dewi, and Ni Ketut Muliati. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar." *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* (April): 699–730.
- Azlim, Darwanis, and Usman Abu Bakar. 2012. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Akuntansi* 1(1): 1–14.
- Azzindani, Rahmatia, and M. Irwan. 2020. "Implementasi SIMDA Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 31–54.
- Delone, William H., Ephraim R. Mclean, and William. 2003. "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update William." *Journal of Management Information Systems* / 19(4): 9–30.
- Donaldson, Lex, and James H. Davis. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management* 16(1): 49–64.
- Dwi, H. 2015. "Adaptive and Engaging E--Learning: Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Jarak Jauh." *Eprints.Uny.Ac.Id*. https://eprints.uny.ac.id/23645/1/pidato_penguhan_GB-Herman-finals.pdf.

- Fahriyah, Aramia, and Rochland Yoseph. 2020. "Keunggulan Kompetitif Spesial Sebagai Strategi Keberlanjutan UKM Di Era New Normal." In Orphanet Journal of Rare Diseases, , 1–9.
- Fauziyah, Euis Mardiyatul. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah Di K." Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa 4(2): 196–209.
- Fokky, Heri Herdiawanto, Fuad Wasitaatmadja, and Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali. 2018. "Metode Penelitian." : 35–47.
- Gusherinsya, Rio, and Samukri. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." Jurnal Akuntansi 9(1): 58–68.
- Ikhsan, Muhammad. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan." repositori.usu.ac.id.
- Inapty, Muhammad, Ali Fikri Biana Adha, and Sri Pancawati Martiningsih. 2016. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov NTB)." Akuntabilitas 9(1).
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. 2016a. "Metode Penelitian Kuantitatif." Variabel 53(9): 1689–99.
- Jauhari, Hadi, Evada Dewata Dewata, and Suhairi Hazisma. 2021. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 8(1): 104–21.
- Karsana, I W, and I Gusti Ngurah Agung Suaryanaayan. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli." E-Jurnal Akuntansi 21(1): 643–70.
- Kesuma, Desmaria Puji, Choirul Anwar, and Darmansyah. 2017a. "Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata.” *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika* 1(2): 141–46.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2021) Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah, 71.

Khairaningrum Mulyanti, and Niken Asyiami Rahma. 2020. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt Iron Bird.” *Logistic and Accounting Development Journal* 1(1): 42–53.

Lestari, Ni Luh Wayan Tiya, and Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi. 2020. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 11(2): 170–78.

Löhde, Ann Sophie K., Giovanna Campopiano, and Andrea Calabrò. 2020. “Beyond Agency and Stewardship Theory: Shareholder–Manager Relationships and Governance Structures in Family Firms.” *Management Decision* 59(2): 390–405.

Lusane, V. M. (2020). *Upah, Pendidikan Dan Teknologi Informasi Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Mia, Oktarina, Kharis Raharjo, and Rita Andini. 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang.” *Journal of Accounting of Accounting* 2(2): 2.

Oktarina, Mia, Kharis Raharjo, and Rita Andini. 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang.” *Journal Of Accounting* 2(2).

Pradnya Paramitha, A.A. Sg. Istri, and Ida Bagus Dharmadiaksa. 2019. “Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Dengan Pendidikan Sebagai Pemoderasi.” *E-Jurnal Akuntansi* 26: 682.

Prasetyo, Aji, Endro Andayani, and Mohammad Sofyan. 2020. “Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial* 1(1): 34–39.

- Prihatini, Tiara. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, Dan Asas – Asas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)." *E-Jra* 09(02): 47–57.
- Pura, Rahman. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 18(April): 1–13.
- Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan." *repositori.usu.ac.id*.
- . 2017b. "Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika* 1(2):
- Rafika, Mulya. 2018. "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2014 - 2018" *Mulya"JurnalEcobisma* 5(2).
http://awsassets.wfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf
<http://hdl.handle.net/10239/131>
https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf
<https://www>.
- Rahmawati, Astika, I Wayan Mustika, and Lilik Handaya Eka. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20(2): 8–17.
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>.
- Rasinta, Ade. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang." (2009): 1–60.
- Rika Krisnawati. 2019. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim."
- Safitri, Ramdhani Nur, Abdul Wahid Mahsuni, and Junaidi. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah

Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bima, NTB).” *E-Jra* 09(02): 47–57.

Sanjaya, Aditya. 2017. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Ka.” *JOM Fekon* 4(1). www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Schillemans, Thomas, and Karl Hagen Bjurstrøm. 2020. “Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies.” *International Public Management Journal* 23(5): 650–76. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>.

Silalahi, Anwar P. Boima. 2020. “Pengaruh Kinerja Teknologi Informasi Dan Inovasi Teknologi Terhadap Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan (Studi Kasus PT Total Bangun Persada, TBK).” *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 5(2): 195–200.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2018. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*: 22–34.

Suhardjo, Daniel Kartika Adhi dan Yohanes. 2013. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Susena, I Nyoman Andi, and Ni Luh Supadmi. 2020. “Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(3): 584.

Ternalemta, Lintje Kalangi, and J Janjte Tinangon. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 2(1): 38–50.

Uviyanti, Siti, and Bambang Agus Pramuka. 2020. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (Bos).” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(7): 471.

- Widia, Retno. 2020. "Pengaruh Good Public Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan di Pemerintahan Kota Ambon." *Jurnal Akuntansi* 6(2): 39–51.
- Wixom, Barbara dan Todd, Peter. 2005. *A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance*. *Information Systems Research*. Vol. 16. No.1. March. Pp.85-102. ISSN 1047-7047
- Wungow, Jhon Fiesgrald, Linda Lambey, and Winston Pontoh. 2016. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan Dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 7(2): 174–88.
- Yanti, Nanda Saputri, Anwar Made, and Supami Wahyu Setiyowati. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8(1): 1–8.
- Zulkarnain, and Dahlia Anggyastuti Ningrum. 2020. "Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi." *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN :2541-0849 e-ISSN:2548-1398 5(5) :197–211.<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607><https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034><https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228><https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>

